

## PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PENANGGULANGAN STUNTING

Anitha Nurak<sup>1</sup>, Hendry Bakri<sup>2</sup>  
Program Studi Ilmu Pemerintahan<sup>1</sup>  
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura  
E-mail: [anitahnurak@gmail.com](mailto:anitahnurak@gmail.com), [bakrihendry@gmail.com](mailto:bakrihendry@gmail.com)

### ABSTRAK

*Stunting menjadi salah satu masalah gizi yang belum terselesaikan hingga saat ini. Demi menyongsong Indonesia Sejahtera Tahun 2025, dan Generasi Emas Tahun 2045, Indonesia wajib mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun kenyataannya Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kemiskinan, masalah gizi dan kesehatan. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Papua, sebesar 55,4 % dari jumlah keluarga yang menjadi sasaran sebesar 3.743 keluarga terdampak stunting. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung ke lapangan dan wawancara langsung dengan sumber informasi dari pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para pemangku kepentingan hingga implementer program di tingkat masyarakat (puskesmas) dan desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua tahun 2021 menunjukkan kasus stunting tertinggi di wilayah Pegunungan Bintang dengan angka 55,4 Persen. Selain program-program yang berasal dari pemerintah pusat, Kabupaten Pegunungan bintang telah memiliki program sendiri dalam upaya percepatan penurunan/penanggulangan stunting di daerahnya. Namun demikian, masih dibutuhkan waktu/proses untuk program-program tersebut dapat terlihat secara nyata pelaksanaannya dan terlihat signifikansi hasilnya. Untuk saat ini, program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah; Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A pada balita, dan pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita.*

**Keywords:** peran, program, pemerintah daerah, stunting.

### ABSTRACT

*Stunting is one of the nutritional problems that has not been resolved until now. In order to welcome a prosperous Indonesia in 2025, and the Golden Generation in 2045, Indonesia must prepare quality human resources. However, the reality is that Indonesia is still faced with various problems such as poverty, nutritional and health problems. Gunung Bintang Regency is one of the districts with the highest stunting prevalence rate in Papua Province, amounting to 55.4% of the number of families targeted at 3,743 families affected by stunting. Data collection was carried out by direct observation to the field and direct interviews with information sources from the*

*pengunungan bintang district government. This study aims to identify and analyze the efforts of local governments in overcoming stunting in these two areas. The research method is carried out qualitatively through in-depth interviews and focus group discussions involving stakeholders to program implementers at the community (puskesmas) and village / kelurahan levels.*

*The results of the study showed that, based on data from the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) of Papua Province in 2021, it showed the highest stunting cases in the Gunung Bintang area with a figure of 55.4 percent. In addition to programs originating from the central government, Gunung Bintang Regency already has its own innovation programs in an effort to accelerate the reduction / reduction of stunting in its area. However, it still takes time/process for these programs to be seen in real terms and the significance of the results can be seen. For now, the stunting prevention programs that have been carried out include; Supplementary Feeding (PMT) for Toddlers and Pregnant Women, Administration of Blood Added Tablets (TTD) to young women and hamil mothers, increased coverage of complete basic immunization in infants and toddlers, administration of vitamin A to toddlers, and zinc administration in cases of diarrhea, especially in pregnant women and toddlers.*

**Keywords:** roles, programs, local government, stunting.

## 1. PENDAHULUAN

Stunting menjadi salah satu masalah gizi yang belum terselesaikan hingga saat ini. Demi menyongsong Indonesia Sejahtera Tahun 2025, dan Generasi Emas Tahun 2045, Indonesia wajib mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun kenyataannya Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kemiskinan, masalah gizi dan kesehatan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting adalah; praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan [1].

Salah satu yang menjadi indikasi lahirnya stunting yakni Penanganan Ibu Hamil. Dengan cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Secara umum, cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 sesuai dengan laporan BAPEDDA per 2020 sebesar 40,90 %. Meskipun demikian, cakupan kunjungan K4 di wilayah kabupaten ini hanya berkisar 30,80% berada

dibawa rata-rata cakupan K4 provinsi papua. Hal tersebut menjadi indikator yang cukup mempengaruhi tumbuh kembang janin di masa emas 1000 hari pertama, sehingga sangat wajib dikunjungi, diberi penyuluhan tentang pentingnya menjaga pola makanan serta kesehatan selama kehamilan [2].

Indikator lain yang bisa kita nilai yakni Rasio puskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua pada tahun 2015 menunjukkan 3 puskesmas melayani 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sebanyak 4 puskesmas melayani 10.000 penduduk. Namun sampai pada tahun 2019 rasio puskesmas mengalami penurunan, hal tersebut terindikasi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tinggi sehingga pelayanan terhadap puskesmas juga semakin meningkat. Pada wilayah pegunungan bintang sendiri ketersediaan fasilitas kesehatan Rumah Sakit hanya 1(satu) Puskesmas tersedia 8 (delapan) serta Puskesmas Pembantu tersedia 9 (sembilan) dengan jumlah warga per kabupaten sebanyak 50.685 dengan jumlah kampung atau desa sebanyak 59 kampung, hal ini menjadi mengkhawatirkan karena rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dengan masyarakat yang dilayani sangatlah timpang dan tidak layak dijadikan standar kesehatan apalagi sebagai upaya memutus mata rantai stunting [3].

Kerdil (Stunting) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya.

Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas penanggulangan stunting. Daerah prioritas atau daerah yang menjadi lokus utama intervensi stunting adalah daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan stunting. Daerah prioritas penanggulangan stunting memiliki anggaran khusus yang memang diperuntukkan bagi program-program percepatan [4].

Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki data real yang digunakan dalam menentukan wilayah prioritas pencegahan stunting pada tingkat kabupaten/kota yakni terdiri dari jumlah kategori keluarga berpotensi risiko stunting Kabupaten ini sebesar 3.747 keluarga, prevalensi balita stunting sebesar 55,4 %, dengan jumlah balita stunting 736 anak, dengan jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 1.538 keluarga. Dimana fasilitas lingkungan tidak sehat seperti keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak sebesar 3.742 keluarga. Keluarga tidak mempunyai jamban yang layak sebesar 1.552 keluarga. Keluarga tidak mempunyai rumah layak huni sebesar 3.745 keluarga. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan menganalisa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam menurunkan prevalensi stunting di daerahnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, agar dapat diperoleh deskripsi tentang Upaya pemerintah pegunungan bintang dalam menurunkan prevalensi stunting di daerahnya. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci.[5] Di tingkat kabupaten, wawancara pemangku kepentingan dilakukan untuk menggali program intervensi stunting yang telah dilakukan di level kabupaten dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya terkait dengan hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintah

provinsi, serta bagaimana pemerintah kabupaten memastikan pelaksanaan intervensi terkait penanggulangan stunting di wilayahnya.

Sesuai dengan tujuan penelitian dari penulis seperti yang dijelaskan diatas yaitu untuk menjelaskan gejala-gejala atau masalah-masalah yang dapat terjadi pada masa sekarang berdasarkan pada pendekatan dan teknik yang sifatnya objektif. Untuk menentukan metode apa yang dipakai dalam suatu kegiatan penelitian yang dilakukan, ditentukan oleh tujuan dan sasaran penelitian itu sendiri.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) terlihat dari tahun 2000 ke tahun 2013 terjadi peningkatan prevalensi stunting sebesar 41,6% atau terjadi peningkatan 3,2% pertahun dan tahun 2013 ke tahun 2018 terjadi penurunan 17,4% atau menurun 3,4% setahun.[6]

Kemudian berdasarkan SSGBI tahun 2019 prevalensi stunting di Papua sebesar 29,4% dan tahun 2021 berdasarkan SSGI prevalensi stunting 29,5%. Angka prevalensi dari 2 survey ini tidak terlalu jauh berbeda hanya berbeda 0,1% . Namun angka prevalensi Papua ini masih di atas angka prevalensi Nasional yaitu 24,4%.[7]

Salah satu yang menjadi indikasi lahirnya stunting yakni Penanganan Ibu Hamil. Dengan Cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Secara umum, cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 sesuai dengan laporan BAPEDDA per 2020 sebesar 40,90 %. Meskipun demikian, cakupan kunjungan K4 di wilayah pegunungan bintang hanya berkisar 30,80% berada dibawa rata-rata cakupan K4 provinsi papua. Hal tersebut menjadi indikator yang cukup mempengaruhi tumbuh kembang janin di masa emas 1000 hari pertama, sehingga sangat wajib dikunjungi, diberi penyuluhan tentang pentingnya menjaga pola makanan serta kesehatan selama kehamilan.[8]

Indikator lain yang bisa kita nilai yakni Rasio puskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua pada tahun 2015 menunjukkan 3 puskesmas melayani 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sebanyak 4 puskesmas melayani 10.000 penduduk. Namun sampai pada tahun 2019 rasio puskesmas mengalami penurunan, hal tersebut terindikasi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang

semakin tinggi sehingga pelayanan terhadap puskesmas juga semakin meningkat. Pada wilayah pegunungan bintang sendiri ketersediaan fasilitas kesehatan Rumah Sakit hanya 1(satu) Puskesmas tersedia 8 (delapan) serta Puskesmas Pembantu tersedia 9 (sembilan) dengan jumlah warga per kabupaten sebanyak 50.685 dengan jumlah kampung atau desa sebanyak 59 kampung, hal ini menjadi mengkhawatirkan karena rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dengan masyarakat yang dilayani sangatlah timpang dan tidak layak dijadikan standar kesehatan apalagi sebagai upaya memutus mata rantai stunting.

Salah satu perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan stunting di kabupaten yakni pembagian tugas yang dilakukan secara komprehensif dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun peran pemerintah kabupaten yakni dengan merumuskan kebijakan daerah yakni kabupaten pegunungan bintang yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting; termasuk peningkatan peran kepala distrik dan kepala kampung dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang berupaya melakukan sosialisasi kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada distrik dan kampung.

Hal terbaru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dengan mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, kampung dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan stunting secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah daerah pun menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur OPD provinsi Papua terkait, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan stunting

Terdapat beberapa program dalam upaya penanggulangan stunting yang telah dilakukan, yaitu: Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil yang dilakukan selama bulan mei dan oktober setiap tahunnya. Ibu hamil dengan status gizi tidak baik (Bumil KEK) sangat beresiko melahirkan anak stunting. Dengan demikian, pemberian PMT kepada bumil kek dinilai efektif untuk mencegah/mengurangi kejadian stunting dinas kesehatan pun mealkukan pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil. Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, seorang informan mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab stunting adalah ibu hamil yang mengalami anemia. Oleh karena itu, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dinilai efektif dalam pencegahan stunting. Tablet tambah darah dikonsumsi minimal 90 tablet selama hamil. Namun demikian, Informan LL memberikan informasi bahwa secara distribusi, tablet tambah darah sudah tersalurkan dengan baik kepada sasaran, namun perihal pemanfaatannya, belum terukur sebab tidak ada pengawasan ataupun pemantauan mengenai diminum atau tidaknya tablet tambah darah yang telah diberikan kepada objek sasaran.

Melalui dinas kesehatan pemerintah daerah pun berkonsentrasi dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi dinilai mampu mencegah berbagai penyakit dan infeksi pada bayi. Bayi yang sering mengalami sakit apalagi hingga terkena infeksi akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar Yang lengkap, cenderung akan menghambat tumbuh kembangnya sehingga berpotensi untuk stunting. Oleh karena itu, pemberian imunisasi dasar lengkap dinilai efektif dalam mengurangi tingkat stunting. inovasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan OPD terkait menghasilkan rekomendasi dan kebijakan dan pedoman untuk melakukan pembinaan kader dari tiga tungku (Kader Kesehatan, Toga dan Tomas). Pemerintah daerah terkhusus dinas kesehatan dalam hal ini meyakinkan bahwa dengan merubah pola makan masyarakat terutama keluarga 1000 HPK, perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan literasi dengan pendekatan pada tiga tungku. Dengan melakukan pengukuran antropometri untuk mengetahui status gizi anak di locus stunting tiap distrik di wilayah kabupaten pegunungan bintang. Pemerintah daerah berharap dapat mengetahui manfaat pemberian Intervensi fortifikasi bahan pangan lokal dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan stunting di 25 di kampung dengan memberikan intervensi bahan fortifikasi. Pemerintah daerah pun berupaya menghasilkan Produk Fortifikasi ubi jalar dan protein nabati yang bisa di adopsi oleh masyarakat dan diterapkan dalam menjaga ketersediaan pangan, Ketika produksi ubi jalar menjadi langka karena erosi dan bencana alam yang lain.

#### **4. KESIMPULAN.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, terkait peran pemerintah daerah kabupaten pegunungan bintang dalam menangani stunting maka dapat disimpulkan bahwa peran

pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan atas program-program yang sudah dijalankan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan program sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, pemberian makanan tambahan untuk balita dan/atau keluarga miskin, makanan tambahan yang diberikan hendaknya benar-benar dipantau apakah dimakan atau tidak oleh objek sasaran. Hal ini pada akhirnya menyebabkan program yang dijalankan tidak mencapai target sasaran, sehingga upaya untuk penanggulangan dan penurunan stunting menjadi kurang tepat sasaran apalagi efektif. Sementara itu, terkait kerjasama dan sinergi lintas sektor terkait upaya penanggulangan stunting yang dimulai dari kampung hanya perlu pengoptimalan dalam pelaksanaannya saja agar dapat terlihat signifikansi hasil yang diharapkan.

Pemerintah daerah pun harus menyelesaikan masalah pembentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dengan adanya tim TPPS ini membantu kabupaten dalam hal pelayanan dan sosialisasi permasalahan stunting ini hingga ke kampung-kampung. Permasalahan lain yang harus diselesaikan oleh pemerintahan daerah kabupaten pegunungan bintang ialah Kurangnya tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan Gizi. Kurangnya tenaga kesehatan yang mempunyai soft dan hardskill dalam melakukan antropometri. Hal ini juga menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah stunting di wilayah kabupaten pegunungan bintang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Elan Satriawan, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 22 November 2018
- [2] [BAPPEDA] Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
- [3] Badan Pusat Statistik Provinsi Papua [BPS] Papua Dalam Angka tahun 2020. .
- [4] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting), 2017.
- [5] J. Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama. CV. Jejak, 2018.
- [6] Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang  
Kemenkes RI.
- [7] Kemenkes RI. 2019. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Jakarta: Kemenkes RI..
- [8] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Pedoman perencanaan program gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan. Jakarta : Bappenas RI.